



ORIGINAL ARTICLE

OPEN ACCES

PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN (MEWUJUDKAN PENINGKATAN MUTU SECARA BERKELANJUTAN)



Beni Harbes¹, Hamdi Abdul Karim², Zulfani Sesmiarni³, Muhammad Armedo⁴, Sarah Salsabila⁵

*Korespondensi:

Email:
beniharbes.bh@gmail.com

Afiliasi Penulis:

1,2,3Universitas Islam Negeri
Sjech M. Djamil Djambek,
Bukittinggi, Indonesia
4,5Universitas Negeri Padang,
Indonesia

Riwayat Artikel:

Penyerahan: 10 Oktober 2024
Revisi: 10 November 2024
Diterima: 12 Desember 2024
Diterbitkan: 31 Desember 2024

Kata Kunci:

Pembentukan, Manajemen,
Pendidikan, Mutu Pendidikan

Keyword:

Financing, Education,
Management, Quality of
Education

Abstrak

Peningkatan mutu pendidikan menjadi tantangan utama bagi lembaga pendidikan dalam menghadapi tantangan akibat keterbatasan sumber daya dan perubahan zaman. Penelitian ini didasari pada pentingnya integrasi perencanaan pendidikan dan manajemen pembentukan sebagai strategi kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kolaboratif antara perencanaan pendidikan berbasis kebutuhan siswa, perkembangan teknologi, dan tuntutan pasar kerja dengan manajemen pembentukan yang efektif. Kajian literatur dan analisis studi kasus menunjukkan bahwa perencanaan strategis jangka panjang dan pendek menjadi panduan relevan bagi pengembangan kurikulum adaptif. Manajemen pembentukan berbasis kolaborasi, seperti dana publik, investasi swasta, dan kemitraan industri, mampu mendukung implementasi rencana pendidikan secara berkelanjutan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Kontribusi orisinal penelitian ini adalah integrasi kedua aspek sebagai pendekatan holistik yang tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran inovatif dan berdaya saing tinggi. Temuan ini menjadi rekomendasi strategis bagi lembaga pendidikan untuk beradaptasi dengan tantangan era digital dan ekonomi global.

Abstract

Improving the quality of education is the main challenge for educational institutions in facing challenges due to limited resources and changing times. This research is based on the importance of integrating educational planning and financing management as a key strategy in improving the quality of education. This research aims to analyze the collaborative role between educational planning based on student needs, technological developments, and job market demands with effective financing management. Literature review and case study analysis show that long and shortterm strategic planning is a relevant guide for adaptive curriculum development. Collaboration-based financing management, such as public funds, private investment and industry partnerships, is able to support the implementation of education plans in a sustainable manner. In addition, transparency in financial management increases accountability and trust among stakeholders. The original contribution of this research is the integration of both aspects as a holistic approach that not only improves the quality of education, but also creates an innovative and highly competitive learning environment. These findings become strategic recommendations for educational institutions to adapt to the challenges of the digital era and the global economy

PENDAHULUAN

If you fail to plan, you are planning to fail (Awwontom 2016), jika engkau gagal dalam merencanakan, engkau sedang merencanakan kegagalan. Pernyataan ini mencerminkan pentingnya perencanaan dalam semua aspek, termasuk manajemen



pembiayaan di lembaga pendidikan. Misalnya, Finlandia menunjukkan bahwa perencanaan berbasis kebutuhan siswa, teknologi, dan pasar kerja dengan didukung manajemen pembiayaan transparan, mampu menciptakan pendidikan berkualitas tanpa biaya tinggi. Mereka mengalokasikan dana secara strategis untuk pelatihan guru, teknologi, dan kurikulum berbasis kompetensi, sehingga menghasilkan sistem pendidikan berdaya saing global. Namun, asumsi bahwa "semakin mahal biaya pendidikan, semakin baik layanannya" sering menimbulkan bias. Biaya tinggi tidak menjamin kualitas jika pengelolaan dana tidak akuntabel. Sebaliknya, lembaga dengan sumber daya terbatas, seperti sekolah vokasi yang bermitra dengan industri, mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja melalui manajemen pembiayaan yang efektif. Integrasi antara perencanaan strategis dan pengelolaan keuangan tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan tetapi juga memastikan keberlanjutan di tengah tantangan global.

Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan bahwa pendidikan harus mampu menciptakan individu yang memiliki keterampilan dan kecakapan untuk kesejahteraan pribadi dan masyarakat (Harbes, Sesmiarni, et al. 2024). Sebuah lembaga pendidikan yang sukses dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan sekolah sesuai dengan visi dan misi, tidak terlepas dari perencanaan pendidikan pada umumnya, termasuk di dalamnya pengelolaan pembiayaan pendidikan. Perencanaan pendidikan dalam konteks luas dan sokongan biaya pendidikan yang tinggi berkaitan dan saling mempengaruhi, karena pada hakikatnya mutu pendidikan akan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan, semakin tinggi dan mahal biaya pendidikan yang digunakan dan dikeluarkan maka semakin baik pula layanan pendidikan tersebut dan mampu menghasilkan lulusan – lulusan yang bermutu dengan hasil belajar yang tinggi. Sepertinya akan sulit merealisasikan mutu pendidikan yang baik apabila tidak didukung oleh biaya pendidikan yang tinggi pula. Dua hal di atas dalam praktik ikut mempengaruhi motivasi kerja guru dan kinerja sekolah pada umumnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki tenaga yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga administratif, laboran, pustakawan, dan teknisi sumber belajar, sarana dan prasarana serta biaya yang mencakup biaya investasi.

Pengelolaan pendidikan adalah bagian terintegrasi dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena pembangunan pendidikan adalah sumber energi untuk mencapai peradaban bangsa, maka visi administrator dan para pengambil kebijakan pendidikan yang tajam menjadi persyaratan penting untuk membangun potensi SDM secara keseluruhan sehingga menjadikan manusia memiliki kemampuan yang berkualitas. Pemahaman administrator utama (kepala sekolah) pendidikan untuk menjawab bagaimana dasar penentuan, pemilihan, dan pengelolaan biaya yang berhubungan dengan guru, jangka waktu penentuan biaya pendidikan dalam semua bidang layanan, dan apa yang berhubungan dengan perkiraan keuangan yang dibutuhkan adalah penting (Papilaya 2022). Mengingat pentingnya peran pembiayaan dan keuangan dalam proses pembelajaran, maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola keuangan ini selanjutnya disebut sebagai manajemen pembiayaan/keuangan. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena ada masalah di bidang pengelolaan pembiayaan, terutama untuk kegiatan rutin dan kegiatan pengembangan sekolah.

Biaya pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam sektor lembaga pendidikan seperti sekolah, baik sekolah yang dikelola oleh pemerintah (sekolah negeri) maupun sekolah yang dikelola oleh masyarakat sendiri (sekolah swasta), yang dikelola oleh yayasan atau badan penyelenggara pendidikan tertentu. Biaya – biaya pendidikan yang berputar dan dipergunakan harus terkelola dan tercatat dengan baik sehingga biaya pendidikan tersebut dapat dikelola secara efektif dan efisien guna menunjang proses pembelajaran di sekolah dan pelbagai program – program sekolah. Pembiayaan pendidikan yang terorganisir dengan baik akan dapat mengoptimalkan layanan pendidikan kepada para komsumennya baik konsumen internal seperti guru, siswa, staf, dan para karyawan yang terlibat dan konsumen external seperti masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Namun, hal sebaliknya apabila pembiayaan pendidikan tidak terorganisir dengan baik, maka segala bentuk layanan pendidikan dan program – program pendidikan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan menghasilkan mutu pendidikan yang ditergetkan.

Pengelolaan biaya pendidikan dilakukan sejak perencanaan, melalui perencanaan anggaran, biaya sekolah, dan penyediaan laporan pertanggungjawaban oleh bendaharawan sekolah. Dalam konteks manajemen, biaya Pendidikan harus memiliki pendekatan sistem yang dikenal dengan *Planing Programing Budgeting Systems (PPBS)* pada awal tahun 1980an, yang selanjutnya dikenal dengan istilah Sistem Penyusunan Program dan Anggaran (SIPPA) atau lebih dikenal sekarang dengan Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RABS), yang selalu dikaitkan dengan RAKS, rencana kerja dan anggaran sekolah. Untuk melakukan pendekatan ini, manajemen sekolah melalui staf manajemen terkait dan bendaharawan di bawah kepala sekolah harus dapat menjalankan fungsi – fungsi manajemen yang meliputi; perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*actuating*), penatausahaan (*organizing*), pengawasan (*controlling*), dan pertanggungjawaban (*reporting*). Apabila semua fungsi itu dapat dijalani dengan baik dan sesuai dengan apa yang seharusnya, maka dipastikan biaya pendidikan yang didapat, digunakan, dan dikeluarkan akan dikelola dengan baik (Dwi 2021).

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional pada umumnya dan dalam konteks sekolah, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, kepala sekolah dan kompetensi kepemimpinannya, sarana prasarana, kurikulum, pengawasan/penyeliaan, pemberdayaan dan manajemen sekolah, dan sebagainya, termasuk di dalamnya peran serta masyarakat (Yanti et al. 2023). Namun, di sekolah terdapat dua unsur yang paling berperan dan sangat menentukan kualitas pendidikan, yakni kepala sekolah dan guru. Dalam perspektif globalisasi, otonomi, dan desentralisasi pendidikan serta untuk menukseskan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah merupakan figur sentral yang menggerakkan semua komponen di sekolah agar bekerja sama mewujudkan tujuan pendidikan. Namun, pada tingkat operasionalnya, guru adalah orang yang berada di barisan paling depannya.

Meskipun demikian, tetap harus diakui bahwa terdapat banyak faktor yang harus diperhitungkan dan yang memungkinkan sehingga kinerja guru (dan kepala sekolah) dan kinerja sekolah umumnya dapat berjalan sebagaimana mestinya (Ridha et al. 2023). Guru termasuk salah satu komponen penting dalam keberhasilan peningkatan kualitas produktivitas sekolah. Bahkan, dapat dikatakan bahwa guru adalah faktor kunci penentu keberhasilan pendidikan (Harbes, Sesmiarni, et al. 2024). Menurut Sanjaya (Rusdiana 2021), untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dimulai dengan menganalisis setiap komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi proses pendidikan itu. Meskipun komponen yang selama ini dianggap sangat mempengaruhi proses pendidikan adalah komponen guru, kinerja dan motivasi kerja guru itu sendiri

dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang bekerja sama dalam suatu sistem. Di antaranya manajemen sekolah dan pengelolaan biaya pendidikan.

Bagaimanapun bagus dan idealnya kurikulum pendidikan, bagaimanapun lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan, tanpa diimbangi dengan pengelolaan sekolah dan manajemen pembiayaan yang baik, maka semuanya akan kurang bermakna. Motivasi kerja guru dan pengembangan kinerja sekolah pada umumnya akan mengalami hambatan yang tidak kecil. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji perencanaan pendidikan, manajemen pembiayaan, dan hubungannya dengan peningkatan mutu pendidikan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Studi pustaka melibatkan pengumpulan data dari literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen lainnya, yang relevan dengan topik penelitian, yaitu manajemen pembiayaan pendidikan di era digital. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang telah ada guna membangun kerangka kerja konseptual yang mendalam. Dengan membaca dan menganalisis literatur secara kritis, penelitian ini dapat mengidentifikasi pola, teori, dan praktik terbaik dalam manajemen pembiayaan pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan Islam. Proses reduksi, *display*, dan penyajian data memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak hanya relevan tetapi juga terorganisasi secara sistematis sesuai prosedur penelitian (Harbes, Afrinaldi, et al. 2024). Pendekatan ini relevan karena permasalahan pembiayaan pendidikan di era digital seringkali melibatkan konsep yang kompleks, seperti teknologi, kolaborasi antar lembaga, dan sumber daya terbatas. Studi pustaka memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi berbagai model dan strategi pembiayaan dari berbagai konteks, memungkinkan peneliti menyusun kerangka konseptual yang aplikatif dan solutif. Hasilnya diharapkan dapat membantu lembaga pendidikan menghadapi tantangan pembiayaan dengan pendekatan yang lebih inovatif dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hakikat Perencanaan

Perencanaan mempunyai arti penting dalam pelbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Teori perencanaan yang relevan, seperti *Planning Programming Budgeting System (PPBS)*, memberikan kerangka konseptual untuk menghubungkan proses perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan pencapaian tujuan organisasi pendidikan. Dalam penelitian ini, teori-teori perencanaan—seperti yang diungkapkan oleh (Faludi 2021), Johnson Kast dan Rosenzweig (Henkaline 2023), serta Wendell French (Pandey and Risal 2022) menggarisbawahi pentingnya perencanaan sebagai proses yang sistematis, berorientasi masa depan, dan bertujuan untuk mencapai hasil yang spesifik.

Integrasi teori-teori ini dilakukan dengan menjadikan aspek utama perencanaan, kesinambungan proses, orientasi masa depan, dan tujuan strategis sebagai dasar analisis dalam merancang kerangka kerja konseptual manajemen pembiayaan pendidikan. PPBS misalnya, digunakan untuk mengaitkan antara perencanaan strategis berbasis kebutuhan siswa dengan pengelolaan anggaran yang efisien. Sistem ini memungkinkan

peneliti untuk mengevaluasi bagaimana program pendidikan dapat dirancang secara terukur berdasarkan tujuan yang jelas dan sumber daya yang tersedia. Dalam analisis hasil, teori-teori ini membantu menjelaskan bahwa keberhasilan lembaga pendidikan sangat bergantung pada konsistensi langkah-langkah perencanaan yang diikuti dengan implementasi manajemen sumber daya secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan teori ke dalam temuan untuk menunjukkan bahwa perencanaan strategis berbasis teori dapat menjadi alat yang praktis dan solutif dalam menghadapi tantangan pembiayaan pendidikan.

Perencanaan pendidikan tidak lain merupakan penerapan konsep perencanaan pada bidang pendidikan, sehingga unsur-unsur yang disebutkan pada hakikat perencanaan berlaku juga untuk bidang pendidikan. Menurut Ulbert Silalahi (Syaddad 2022), perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan sumber daya manusia, sumber informasi, finansial, metode dan waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Sedangkan Willian H. Newman (Murtafiah 2022a) mengemukakan bahwa "Perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode, dan prosedur tertentu penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari." Dari pengertian di atas, perencanaan dapat diartikan sebagai kegiatan menentukan tujuan dan merumuskan serta mengatur pendayagunaan sumber-sumber daya: informasi, finansial, metode dan waktu yang diikuti dengan pengambilan keputusan serta penjelasannya tentang pencapaian tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu, serta penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Konsep Dasar Perencanaan Pendidikan

Banyak konsep yang dikemukakan oleh para ahli mengenai rumusan perencanaan pendidikan sebagai berikut (Nardawati 2021): (1) Guruge, perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. (2) Comb, perencanaan pendidikan merupakan aplikasi analisis rasional dan sistematis dalam proses pengembangan pendidikan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan dalam usahanya memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan (Pendidikan), baik tujuan yang berhubungan dengan anak didik maupun masyarakat. (3) Yusuf Enoch, perencanaan pendidikan merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijaksanaan mengatasi masalah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang sosial ekonomi, sosial budaya, dan kebutuhan pembangunan secara menyeluruh terhadap pendidikan nasional.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dalam perencanaan pendidikan terdapat unsur-unsur sebagai berikut (Murtafiah 2022a). (1) Merupakan analisis rasional dan sistematis yang didasarkan pada teori-teori; *radical, advocacy, transactive, synoptic* dan *incremental* dengan penggunaan model serta pendekatan; *social demand, human capital investment, man power planning, cost effectiveness, rate of return* dan pendekatan sistem. (2) Merupakan proses pembangunan dan pengembangan pendidikan, dalam arti perencanaan pendidikan dilakukan dalam rangka penyempurnaan dan reformasi pendidikan, yaitu berawal dari keadaan sekarang menuju pada perkembangan yang dicita-citakan secara terus menerus. (3) Merupakan kegiatan investasi di bidang pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang baru bisa dinikmati hasilnya pada tahun-tahun atau generasi yang akan datang. (4)

Merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijaksanaan baik jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek; perencanaan makro maupun mikro; perencanaan strategik, manajerial, maupun operasional; perencanaan perbaikan atau pengembangan, serta perencanaan *partisipatory*. (5) Prinsip efektivitas dan efisiensi, dalam perencanaan pendidikan sangat memperhatikan aspek ekonomi dengan memperhatikan penggalian sumber-sumber pembiayaan Pendidikan dan alokasi biaya, baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan pengembangan. (6) Keberhasilan perencanaan pendidikan amat ditentukan oleh cara, sifat dan proses pengambilan keputusan yang diambil para perencana pendidikan, dengan kepala sekolah sebagai manajernya, yang didasarkan pada tujuan pembangunan nasional serta strategi dan kebijakan operasional pendidikan serta cara pendekatan yang digunakan.

Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pendidikan

Banyak tujuan yang hendak dicapai dari perencanaan pendidikan, namun dalam artikel ini, dititikberatkan pada tujuan untuk menyediakan pola kegiatan-kegiatan secara matang bagi berbagai bidang/satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijaksanaan. Di samping itu, untuk menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan diorientasikan pada masa depan. Dengan demikian, dapat meyakinkan secara logis dan rasional kepada *stakeholder* pendidikan terhadap komitmen bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan suatu keharusan, karena banyak manfaat yang dapat diperoleh yaitu (Arifudin, Sholeha, and Umami 2021): (1) Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. (2) Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. (3) Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur pendidik (guru), tenaga kependidikan maupun unsur siswa pada lembaga pendidikan. (4) Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. (5) Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan dan peningkatan kinerja. (6) Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya-biaya yang ada dikelola secara efisien.

Di samping memiliki manfaat, perencanaan pendidikan juga memiliki arti yang sangat penting. Menurut Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsudin Makmun, perencanaan memiliki arti penting sebagai berikut (Arifudin, Sholeha, and Umami 2021). (1) Dengan adanya perencanaan, diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. (2) Dengan perencanaan, maka dapat dilakukan suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dan kaggalan dapat dibatasi atau dicegah sedini mungkin. (3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik (*the best alternatif*) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*). (4) Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya. (5) Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja usaha atau organisasi, termasuk pendidikan.

Model Perencanaan Pendidikan

Salah satu model perencanaan pendidikan adalah Model *PPBS (Planning, Programming, Budgeting, System)*. Model ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan SP4 (Sistem Perencanaan, Penyusunan Program dan Penganggaran). Menurut Mc. Ashan (Wahyudin 2020), *PPBS (Planning, Programming, Budgeting, System)* adalah suatu pengorganisasian yang sistematis, analitis, dan informasi keuangan yang terintegrasi ke dalam semua program yang direncanakan, diimplementasikan, dan dievaluasi untuk menolong melakukan alokasi sumber pendidikan termasuk pembiayaan. Kast dan Rosenzweig mengemukakan bahwa *PPBS* merupakan suatu pendekatan yang sistematik yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program untuk dicapai, menemukan besarnya biaya dan alternatif dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang.

Adapun faktor-faktor yang ditekankan oleh para perencana pendidikan dalam perencanaan pendidikan menggunakan model *PPBS* adalah sebagai berikut (Muflihin 2020): (1) Berorientasi kepada *output* atau efektivitas. Usaha utama penyusunan *budget* terarah kepada pencapaian tujuan program. Dana dialokasikan sedemikian rupa dengan memperhitungkan hubungannya dengan sumber-sumber yang lain yang secara bersama menyelesaikan tugas secara efektif. (2) Dana dialokasikan kepada setiap program yang akan dikerjakan yang telah disusun secara analitis dan sistematis. Program utama, proyek, atau seluruh kegiatan dianalisis terlebih dahulu secara sistematis untuk mendapatkan program-program yang spesifik. Kemudian, dialokasikan kepada program-program ini dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kaitan antar program sendiri. Di sini, pemetaan dan analisa kebutuhan pengembangan menjadi hal yang penting. (3) Pembiayaan bersifat terencana dan terintegrasi. Unsur pembiayaan masuk dalam analisis sistem menjadi satu dengan analisis alat dan metode. (4) Alokasi dana diatur/disusun atas dasar realita. Alokasi dana tidak boleh dilakukan atas dasar angan-angan pribadi atau kelompok orang belaka atau atas dasar pemerataan. Melainkan, harus dilakukan atas dasar kebutuhan nyata dan skala prioritas. Misalnya, alokasi anggaran yang diajukan masing-masing sub kegiatan ekstra kurikuler di sekolah yang disodorkan masing-masing sub unit atau kelompok kerja (Pokja) kurang memenuhi sasaran. Seringnya terjadi *mark up* dan ketika dana diturunkan tidak termanfaatkan dengan baik. (5) Pengalokasian dana dibuat sedemikian rupa sehingga dana dapat dimanfaatkan secara efisien. Hal ini dapat diperoleh melalui studi empiris tersebut di atas, berdasarkan kebutuhan nyata, prioritas, dan dengan menggabungkan kegiatan-kegiatan yang mirip menjadi kegiatan kelompok yang dikerjakan bersama dengan alat dan metode yang sama.

Dengan demikian, terdapat hubungan antara perencanaan pendidikan dengan manajemen pendidikan. Menurut Depdikbud, manajemen pendidikan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, Pengendalian tenaga Pendidikan dan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sedangkan perencanaan Pendidikan merupakan aplikasi analisis rasional dan sistematis dalam proses pengembangan pendidikan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan dalam usahanya memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan (pendidikan) baik tujuan yang berhubungan dengan peserta didik maupun masyarakat.

Perencanaan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, kepemimpinan, komunikasi, serta pengawasan. Perencanaan pada manajemen pendidikan merupakan kegiatan manajerial dalam rangka melaksanakan fungsi manajemen yaitu merancang pemberdayaan sumber-sumber daya pendidikan yang ada, baik manusia, sarana, biaya, teknologi dan informasi secara bermutu, efektif dan efisien, serta memiliki relevansi dan didasarkan atas kreativitas dan realitas pelaksanaannya dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat terhadap pendidikan.

Konsep Dasar Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Manajemen Pembiayaan pendidikan adalah serangkaian perencanaan dan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkirakan biaya atau kebutuhan yang dipakai dalam proses pendidikan untuk menunjang proses belajarmengajar sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam setahun. Selanjutnya, Manuel Zymelman menulis bahwa: "Manajemen pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber saja tetapi, penggunaan dana-dana secara efisien (Syahbuddin 2019). Makin efisien sistem pendidikan itu, makin kurang pula yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya, sehingga banyak yang dicapai dengan anggaran yang tersedia". Mary Parker Follet (Rosadi and Muntholib 2021) telah mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini bermakna bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk secara sinergi mencapai tujuan organisasi. Dalam definisi operasionalnya, Ricky W. Griffin menjelaskan bahwa manajemen tidak lain adalah "Satu proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengkoordinasian (*coordinating*), dan pengontrolan (*controlling*) sumber daya untuk mencapai sasaran (*goal's*) secara efektif dan efisien (L. Hasibuan, Us, and Pendi 2021).

Menurut Masditou (Musolin and Mudmiroh 2021), pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sistem sentral dalam pendidikan karena berkaitan dengan pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dari hal yang terkecil sampai kepada pembiayaan operasional yang besar. Penggunaan pembiayaan pendidikan di sekolah diorientasikan kepada pembiayaan operasional pendidikan yang mendukung pada peningkatan mutu pendidikan yang tepat sasaran. Dengan demikian, sistem tata kelola manajemen keuangan sekolah harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan Pendidikan

Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan

Menurut Choiriyah (Mayasari et al. 2023), dalam sudut pandang mikro, manajemen keuangan di lembaga pendidikan perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Pertama, transparansi. Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan perencanaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, serta pertanggungjawabannya harus jelas sehingga dapat memudahkan pihak-pihak yang

berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, Masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah, terutama untuk membangkitkan motivasi kerja bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

Kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas *performancenya* dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan semua uang di sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, Masyarakat, pemerintah, dan terutama kepada warga sekolah.

Ketiga, efektivitas. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner (Anam, Muzanni, and Hadi 2023) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. "*Effectiveness characterized by qualitative outcomes*". Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomesnya* sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Keempat, efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal (A. R. D. Hasibuan 2021) di antaranya (1) Dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil – kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. (2) Dari segi hasil, kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak – banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.

Bagaimana prinsip – prinsip ini diaplikasikan dalam manajemen pembiayaan di sekolah, khususnya di sekolah negeri? Sumber utama pembiayaan sekolah adalah dana BOS. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan Program BOS (Mulyana and Sholihat 2023). Dalam rangka implementasi penerapan MBS di sekolah, dana BOS diharapkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana BOS secara transparan artinya dalam pengelolaan dana BOS diketahui oleh *stakeholder* sekolah.

Pengelolaan dana BOS secara akuntabel artinya pengelolaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemerintah maupun masyarakat. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud kontrol dari masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan transparasi dan akuntabilitas dalam keuangan sekolah dan penggunaan dana BOS belum berjalan dengan baik. Masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh warga sekolah atau masyarakat.

Menurut Fitri (Nugraha, Hairani, and Prisila 2023), dalam perencanaan penggunaan dana BOS, hal utama yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun RAPBS. RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran (Mulyana and Sholihat 2023). Dengan demikian, RAPBS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya, baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RAPBS perlu memperhatikan asas anggaran antara lain asas kecermatan, asas terinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asas periodik, dan asas pembebanan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien.

PEMBAHASAN

Guru merupakan unsur penting dalam pendidikan (organisasi) yang amat menentukan, maka hal-hal yang berhubungan dengan konsep motivasi sungguh harus diperhatikan dari setiap perilaku yang berkepentingan dalam bidang pendidikan di sekolah ini untuk menentukan kemajuan pendidikan di sekolah sesuai dengan rencana sebelumnya (Harbes et al. 2023). Di satu pihak, dari segi pasif, motivasi tampak sebagai kebutuhan dan sekaligus sebagai pendorong yang dapat mengarahkan semua potensi baik tenaga kerja maupun sumber daya lainnya. Di lain pihak dari segi aktif, motivasi tampak sebagai suatu usaha positif dalam menggerakan daya dan potensi tenaga kerja agar secara produktif berhasil mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hasil ini mendukung pandangan (Murtafiah, 2022) yang menyatakan bahwa motivasi adalah elemen kunci yang menggerakkan tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, motivasi itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk kualitas manajemen sekolah. Sebagai contoh, teori Wendell French (Pandey & Risal, 2022) tentang perencanaan menekankan pentingnya penyelarasan tujuan institusi dengan kebutuhan sumber daya. Dalam konteks ini, perencanaan yang baik memastikan bahwa tujuan sekolah tercapai melalui alokasi sumber daya yang optimal.

Selanjutnya, penelitian ini sejalan dengan Haq (Mulyana and Sholihat 2023), yang menyatakan bahwa tanpa program pengelolaan yang baik, sulit bagi sekolah untuk mencapai tujuannya. Pengelolaan pembiayaan yang profesional dan transparan tidak hanya mendukung implementasi program pendidikan tetapi juga meningkatkan motivasi kerja guru. Hal ini terjadi karena guru merasa didukung oleh sistem yang adil dan transparan, sehingga mereka dapat bekerja secara produktif. Penjabaran hasil ini juga relevan dengan teori PPBS, yang menekankan perlunya pendekatan sistematis dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya. Dengan pengelolaan kerja sekolah yang mengacu pada kebijakan terukur dan terpantau, proses pendidikan menjadi lebih efektif, meningkatkan kinerja keseluruhan lembaga pendidikan. Pengelolaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman bagi sekolah dalam menjalankan berbagai kegiatan secara sistematis dan terarah. Dengan adanya pengelolaan yang baik, sekolah dapat mengukur efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari program yang ada, serta menentukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Proses ini memungkinkan sekolah untuk terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan

teknologi, dan perubahan tuntutan di dunia kerja, sehingga relevansi pendidikan tetap terjaga (Anggal, Yuda, and Amon 2020).

Selain itu, pengelolaan pembiayaan yang terencana dan efisien menjadi elemen penunjang utama dalam mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pendidikan. Pembiayaan yang baik memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan operasional, pengembangan kurikulum, peningkatan fasilitas, serta program pelatihan guru. Dengan demikian, tujuan pendidikan dapat tercapai secara menyeluruh, mencakup aspek akademik, non-akademik, serta pengembangan karakter siswa, yang pada akhirnya mendorong terciptanya pendidikan berkualitas tinggi (Sa'baini and Amsari 2023).

Dengan demikian, perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini mencakup proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan, dan penentuan aparat pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, dan mencakup semua usaha yang diorganisasikan dengan dasar perhitungan untuk memajukan perkembangan dalam mencapai tujuan tertentu. Hal ini mengandaikan bahwa sekolah sebagai bagian dari lembaga pendidikan harus memiliki tujuan yang hendak dicapai dari sesuatu yang direncanakan. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan serangkaian kegiatan yang tersusun sistematis untuk mencapai tujuan dan sumber daya manusia. Diperlukan juga penetapan jangka waktu kapan rencana akan dilaksanakan dan penerjemahan rencana ke dalam prioritas program nyata dan mudah diaplikasikan.

Setiap lembaga pendidikan seperti yang dituntut dalam dokumen kurikulum sekolah sudah tentu memiliki visi dan misi yang dirumuskan bersama dan menjadi arah dasar berbagai pedoman dan kegiatan pengembangan. Namun, perencanaan itu belum menyentuh secara jelas (Mulyasa 2022). Visi dan misi yang dirumuskan berhenti di sini dan tidak dilanjutkan dengan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sebenarnya, sudah terdapat visi dan misi yang ditetapkan, tetapi secara konseptual belum tergambar secara jelas, bagaimana konsep pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, bagaimana konsep perencanaan pembelajaran bermutu untuk menciptakan mutu lulusan, bagaimana konsep perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada, dan terutama bagaimana konsep perencanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Padahal idealnya, seperti diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, ditegaskan bahwa satuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional memerlukan standar pengelolaan. Standar ini memuat sepuluh komponen yaitu (1) visi, misi dan tujuan, (2) rencana kerja jangka menengah, (3) rencana kerja tahunan, (4) kepemimpinan, (5) budaya, (6) pelaksanaan, (7) pengembangan kurikulum dan penjamin mutu internal, (8) pengawasan, (9) akuntabilitas, dan (10) sistem informasi manajemen (Mulyana and Sholihat 2023). Standar pengelolaan, yang di dalamnya termasuk perencanaan pendidikan, adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan. Idealnya, dari segi perencanaan, Manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan yang besar kepada kepala sekolah, menyusun dan menetapkan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku. Tindak lanjut dari perencanaan adalah pengorganisasian, yaitu dengan menetapkan program kerja, yang di dalamnya mencakup semua kegiatan yang dilakukan melalui pemanfaatan ketersediaan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek pelaksanaan visi, misi,

dan tujuan serta realisasi program menuntut adanya sejumlah tindakan untuk mengerjakan dan menggunakan seluruh sumber daya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan (Mulyana and Sholihat 2023).

Hal penting dalam konteks ini adalah penganggaran, sebagai proses menyusun rencana penggunaan dana keuangan yang meliputi pengalokasian dan pendistribusian secara akuntabel, transparan, dan mengacu pada ketentuan perundungan – undangan yang berlaku (Mulyana and Sholihat 2023). Langkah selanjutnya dari kebijakan manajemen sekolah ini adalah pengendalian melalui proses pemberian balikan dan tindak lanjut pembandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan diakhiri dengan evaluasi, sebagai tindakan penyesuaian apabila terdapat penyimpangan aktivitas berdasarkan standar atau pedoman yang telah dibuat sehingga kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat diperbaiki atau ditingkatkan, supaya berjalan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan (Mulyana and Sholihat 2023).

Dalam aspek manajemen dan perencanaan pendidikan di tingkat sekolah, pengelolaan pembiayaan ini penting untuk meminimalisir sumber konflik, antara komitmen mencapai tujuan dan hambatan yang diciptakan sendiri untuk mencapai tujuan itu (Mulyana and Sholihat 2023). Pengelolaan yang baik akan menumbuhkan motivasi kerja pendidik dan tenaga Pendidikan guna meningkatkan kinerja sekolah dalam rangka meningkatkan mutu lulusan. Perencanaan dan pengelolaan yang baik akan menumbuhkan pula kepercayaan semua *stakeholder* pendidikan dan berharap bahwa cita – cita untuk meningkatkan mutu pendidikan mendapatkan jalan lebar ke arah itu. Dengan demikian, perencanaan pendidikan yang baik dan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang terstandar merupakan tugas manajemen yang tidak akan pernah berhenti. Hal ini mudah, tetapi merupakan jalan untuk meningkatkan mutu pendidikan, meski jalan itu adalah jalan sempit. Pembahasan difokuskan pada mengaitkan data dan hasil analisisnya dengan permasalahan atau tujuan penelitian. Pembahasan juga difokuskan untuk mengaitkan hasil atau temuan penelitian dengan hasil – hasil penelitian dan teori – teori relevan. Pembahasan juga merupakan jawaban pertanyaan mengapa ditemukan fakta seperti pada data.

KESIMPULAN

Perencanaan pendidikan dan manajemen pembiayaan diidentifikasi sebagai poin kritis dalam menghadapi tantangan meningkatkan mutu pendidikan. Dalam menanggapi jalan sempit ini, evaluasi menyeluruh terhadap strategi perencanaan dan pengelolaan dana pendidikan harus menjadi prioritas kebijakan. Langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi pembentukan mekanisme anggaran berbasis kinerja yang transparan, penguatan pelatihan manajemen keuangan untuk kepala sekolah dan guru, serta kolaborasi strategis antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor industri melalui program pendanaan bersama atau beasiswa berbasis kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pembentukan forum multi – *stakeholder* yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memastikan perencanaan pendidikan dan pengelolaan pembiayaan berjalan inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan langkah – langkah ini, diharapkan tercipta sistem pendidikan yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan zaman tetapi juga mampu menjawab tantangan disparitas mutu secara nasional.

REFERENSI

- Anam, M Chairul, Ahmad Muzanni, and Samsul Hadi. 2023. "Implementasi Administrasi Sekolah Dasar Negeri 30 Ampenan." *Transformasi: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal* 9 (1): 41 – 50.
- Anggal, Nikolaus, Yohanes Yuda, and Lorensius Amon. 2020. *Manajemen Pendidikan: Penggunaan Sumber Daya Secara Efektif Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*. CV. Gunawana Lestari.
- Arifudin, Moh, Fathma Zahara Sholeha, and Lilis Fikriya Umami. 2021. "Planning (Perencanaan) dalam Manajemen Pendidikan Islam." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 2 (02): 162 – 83.
- Awwontom, Felicia. 2016. "If You Fail to Plan, You Are Planning to Fail." *Can Business Plans Reduce the High Failure Rate of SMEs*, 74 – 89.
- Dwi, Ardiyanto Aan. 2021. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis IT di Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020." IAIN Jember.
- Faludi, Andreas. 2021. "Populism and Spatial Planning Meta—Theory." *DisP-The Planning Review* 57 (4): 68 – 76.
- Harbes, Beni, Afrinaldi Afrinaldi, Iswantir Iswantir, Widya Syafitri, Sarah Salsabila, and Muhammad Armedo. 2024. "Evaluation of the Character Education Strengthening Management Program At SMK Negeri 1 Batipuh: Islamic Education and Management." *GIC Proceeding* 2:155 – 62.
- Harbes, Beni, Zulfani Sesmiarni, Charles Charles, Ridha Ahida, Iswantir Iswantir, Wedra Aprison, and Muhammad Armedo. 2024. "Implementasi Model Pembelajaran Teaching Factory (TEFA) di SMK Negeri 1 Batipuh." *Paramacitra Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2 (01): 9 – 16.
- Harbes, Beni, Zulfani Sesmiarni, Supratman Zakir, Ali Mustopa Yakub Simbolon, Indra Devi, and Aisyah Syafitri. 2023. "Manajemen Sumber Daya Tenaga Pendidik di SMKS Pembangunan Bukittinggi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (4): 3683 – 97.
- Hasibuan, Anggita Rizki Defiani. 2021. "Penerapan Tata Kelola Keuangan Pendidikan Sekolah Dasar pada Akhir Periode Tahun 2020." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 4 (1): 304 – 9.
- Hasibuan, Lias, Kasful Anwar Us, and Hamdi Zas Pendi. 2021. "Pengelolaan Biaya Pendidikan: Kajian Studi Pustaka." *Jurnal Literasiologi* 5 (2).
- Henkaline, Kristin N. 2023. "Eighth Grade Students' Perceptions of History Education." The Ohio State University.
- Mayasari, Nanny, Rusydi Fauzan, Aresyama Hein Temmar, Irena SeptianitaKaomaneng, Yulia Ningsih, Sartika Yuliana, Rosnaini Daga, Yulius Luturmas, Frans Sudirjo, and Desna Aromatica. 2023. *Menajemen Pelayanan Publik Era 5.0*. Global Eksekutif Teknologi.
- Muflihin, Muh Hizbul. 2020. "Administrasi Manajemen Pendidikan." *Klaten: Gema Nusa*.
- Mulyana, Asep, and Entat Sholihat. 2023. "Manajemen Pendidikan Islam Tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA." *Quality: Journal Of Education, Arabic And Islamic Studies* 1 (1): 1 – 7.
- Mulyasa, H Enco. 2022. *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara.
- Murtafiah, Nurul Hidayati. 2022a. "Konsep Perencanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meingkatkan Mutu Pendidikan." *UNISAN JURNAL* 1 (4): 149 – 60.
- . 2022b. "Konsep Perencanaan Manajemen Pembiayaan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan." *UNISAN JURNAL* 1 (4): 149 – 60.
- Musolin, Muhsin, and Laelatul Mudmiroh. 2021. "Implementasi Manajemen Pembiayaan Di MTs An-Nawawi 01 Berjan Purworejo." *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3 (2): 147 – 66.

- Nardawati, Nardawati. 2021. "Perencanaan Pendidikan yang Baik Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Digital." *Jurnal Literasiologi* 6 (2): 556568.
- Nugraha, Aditya, Nurul Khoiriah Hairani, and Rizki Prisila. 2023. "Strategi Pengelola Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas." *PEMA (Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat)* 3 (2): 75–80.
- Pandey, Dhruba Lal, and Nischal Risal. 2022. "Strategic Partnership: A Better Route to Human Resource Management." *PYC Nepal Journal of Management* 15 (1): 17–27.
- Papilaya, Josef. 2022. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Ridha, Abdurrasyid, Junaidi Junaidi, Ali Mustopa Yakub, Beni Harbes, and Tasya Huida Tasya Huida. 2023. "The Effect of Principal Supervision on Teacher Performance at Prof Dr Hamka Maninjau Islamic Boarding School." *GIC Proceeding* 1:1–7.
- Rosadi, Kemas Imron, and Muntholib Muntholib. 2021. "Manajemen Sebagai Sains, Seni dan Profesi Serta Implementasinya di Madrasah Tsanawiyah Madinatun Najah Rengat." *Akademika* 17 (1): 31–46.
- Rusdiana, HA. 2021. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*. Fitrah Ilhami.
- Sa'baini, Siti, and Syahrul Amsari. 2023. "Implementasi Sistem Pengelolaan Manajemen Keuangan pada Tadika Tinta Khalifah Al Fikh Orchard Penang Malaysia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8 (3).
- Syaddad, Ahmad. 2022. "Penerapan Perencanaan Pembelajaran Berbasis Al-Qur'an." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3 (4): 175–84.
- Syahbuddin, Ahmad. 2019. "Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi di Sekolah Dasarnegeri dan Swasta Kota Langsa)."
- Wahyudin, Undang Ruslan. 2020. *Manajemen Pendidikan (Teori dan Praktik dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional)*. Deepublish.
- Yanti, Ira, Darul Ilmi, Ali Mustopa Yakub Simbolon, Beni Harbes, and Weni Sumarni. 2023. "The Concept of Curriculum Innovation Today." *GIC Proceeding* 1:184–93.